



Tantangan dan Strategi Kebijakan Pendidikan dalam Mengatasi Toleransi: Tiga Dosa Besar Pendidikan dalam Konteks Pendidikan Multikultural

Septiani Cahyaning Putri

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

septiani.cahyaning.2201316@students.um.ac.id

1. Pendahuluan

Intoleransi adalah gejala sosial yang semakin mendalam dan meresahkan dalam dunia yang semakin multikultural ini. Menciptakan masyarakat yang toleran, yang mampu menghormati perbedaan dan mempromosikan kerukunan antarberbagai budaya dan agama, adalah tujuan yang sangat penting dalam pendidikan. Namun, untuk mencapai hal ini, kita perlu menghadapi serangkaian tantangan yang terkait dengan kebijakan pendidikan, yang sering kali tidak hanya menghambat upaya untuk mengajarkan toleransi, tetapi juga mungkin memperkuat intoleransi itu sendiri.

Dalam artikel opini ini, kita akan membahas peran kebijakan pendidikan dalam menghadapi tantangan intoleransi, dengan fokus pada tiga dosa besar yang terkadang menjadi hambatan dalam pendidikan multikultural yang inklusif. Pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk pandangan dan sikap generasi mendatang terhadap perbedaan dan pluralitas. Untuk menciptakan masyarakat yang menghargai keragaman, kita harus menjadikan pendidikan sebagai wahana untuk meredakan ketegangan dan meningkatkan pemahaman.

Dalam eksplorasi kita, kita akan menyoroti berbagai strategi dan solusi yang dapat diterapkan dalam kebijakan pendidikan, sekaligus mencoba mengidentifikasi penyebab umum yang menyebabkan intoleransi berkembang di kalangan pelajar. Dengan demikian, kita akan menggali bagaimana pendidikan multikultural yang efektif dapat membantu masyarakat menghadapi tantangan intoleransi dan meraih masa depan yang lebih inklusif dan harmonis.

2. Hasil dan Pembahasan

2.1 Tantangan Intoleransi dalam Konteks Pendidikan Multikultural

Dalam era globalisasi dan migrasi yang pesat, banyak masyarakat di seluruh dunia mengalami tingkat keragaman budaya dan agama yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini telah memunculkan pertanyaan kritis tentang bagaimana kita, sebagai masyarakat dan lembaga pendidikan, dapat menghadapi tantangan intoleransi yang semakin memprihatinkan. Kita tidak hanya harus memastikan agar semua individu memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan tersebut mempromosikan penghargaan terhadap perbedaan dan keragaman. Di dalam setiap sistem pendidikan, terdapat kebijakan yang memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana nilai-nilai toleransi diajarkan dan dipraktikkan. Namun, seringkali kebijakan pendidikan itu sendiri dapat menjadi salah satu hambatan dalam mencapai tujuan ini. Oleh karena itu, penting

untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang melingkupi kebijakan pendidikan dalam konteks pendidikan multikultural.

2.2 Dosa Besar Pendidikan dalam Konteks Toleransi

Ketika kita berbicara tentang tantangan dan strategi kebijakan pendidikan dalam mengatasi intoleransi, ada tiga dosa besar yang sering menjadi penghalang dalam upaya menciptakan pendidikan multikultural yang inklusif:

Kurangnya Isi Kurikulum yang Multikultural: Salah satu dosa besar pendidikan adalah kurangnya representasi budaya dan sejarah yang memadai dalam kurikulum sekolah. Ketika pelajaran hanya menggambarkan satu sudut pandang, itu dapat menghasilkan ketidakpengertian dan stereotip terhadap kelompok-kelompok tertentu. Dalam konteks pendidikan multikultural, kurikulum harus mencerminkan keragaman masyarakat dengan mencakup berbagai latar belakang budaya, etnis, dan agama. Kurikulum pendidikan di Indonesia kurang mencerminkan keragaman budaya dan agama, seringkali lebih terfokus pada kelompok mayoritas, mengakibatkan stereotip, prasangka, dan minimnya pemahaman tentang keragaman budaya. Ini adalah masalah penting yang perlu diatasi untuk mencapai pendidikan multikultural yang lebih inklusif dan toleran.

Ketidaksetaraan Akses ke Pendidikan: Dalam banyak kasus, akses yang tidak setara ke pendidikan masih menjadi masalah serius. Banyak komunitas minoritas dan kelompok rentan memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan yang berkualitas. Salah satu contoh kasus ketidaksetaraan akses ke pendidikan di Indonesia adalah ketidakmampuan sebagian anak di daerah pedesaan, seperti di Kabupaten Nduga, Papua, untuk mengakses pendidikan berkualitas karena konflik bersenjata dan kondisi geografis yang sulit. Ini menciptakan kesenjangan pendidikan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kebijakan pendidikan harus memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Ketidakpedulian terhadap Pendidikan Multikultural: Salah satu dosa besar yang lebih tersembunyi adalah ketidakpedulian terhadap pendidikan multikultural dalam praktik sehari-hari. Ketidakpedulian terhadap pendidikan multikultural di Indonesia tercermin dalam kurangnya pelatihan guru yang memadai untuk mengintegrasikan nilai-nilai multikultural. Guru dan tenaga pendidik sering tidak memiliki pelatihan atau pemahaman yang memadai tentang bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan multikulturalisme ke dalam pengajaran mereka. Kurikulum seringkali tidak mencerminkan keragaman budaya dan agama di Indonesia. Beberapa sekolah mungkin tidak aktif dalam menerapkan nilai-nilai multikultural di lingkungan sekolah. Kesadaran masyarakat tentang isu-isu multikultural masih rendah, yang menghambat perubahan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif. Tanpa dukungan dan pemahaman ini, upaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif seringkali terbengkalai.

2.3 Strategi Kebijakan Pendidikan untuk Mengatasi Intoleransi

Untuk mengatasi dosa-dosa besar ini dan mewujudkan pendidikan multikultural yang inklusif, perlu ada strategi kebijakan yang lebih kuat dan berfokus pada tiga poin kunci:

1. **Revisi Kurikulum untuk Mencerminkan Keragaman:** Kebijakan pendidikan harus mendukung revisi kurikulum yang lebih inklusif dan multikultural. Hal ini mencakup

peningkatan dalam representasi budaya, sejarah, dan agama yang beragam, sehingga siswa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keragaman masyarakat mereka. Guru-guru juga perlu diberi pelatihan untuk mengintegrasikan materi yang lebih beragam ke dalam pengajaran mereka.

2. Memastikan Akses yang Sama: Kebijakan pendidikan harus berfokus pada mengatasi ketidaksetaraan akses ke pendidikan. Ini bisa mencakup upaya untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah di daerah yang kurang berkembang mendapatkan sumber daya yang cukup, dan program yang mendorong partisipasi kelompok minoritas dalam pendidikan yang lebih tinggi.
3. Pelatihan Guru yang Lebih Baik: Guru adalah kunci dalam merancang pengalaman pendidikan yang inklusif. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus memasukkan pelatihan yang lebih baik dalam kurikulum pendidikan guru. Guru perlu dilatih untuk memahami dan menerapkan pendekatan multikultural dalam kelas mereka, serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi bias mereka sendiri.

3. Simpulan

Hanya dengan mengatasi dosa-dosa besar dalam kebijakan pendidikan, kita dapat mencapai tujuan yang lebih inklusif dan toleran dalam pendidikan multikultural. Intoleransi adalah masalah yang menghancurkan, menghasilkan konflik, dan menghalangi perkembangan sosial yang harmonis. Tiga dosa besar dalam kebijakan pendidikan perlu diatasi. Pertama, kurikulum harus direvisi untuk mencerminkan keragaman budaya, agama, dan sejarah. Ini membantu siswa memahami perbedaan dan menghindari stereotip negatif. Kedua, perlu memastikan akses yang sama ke pendidikan berkualitas untuk semua individu, tanpa memandang latar belakang. Ini akan menjadikan pendidikan multikultural hak yang dapat diakses oleh semua. Terakhir, pelatihan guru perlu ditingkatkan, memberi mereka keterampilan untuk mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dalam pengajaran. Dengan mengatasi dosa-dosa ini dan mengimplementasikan strategi kebijakan yang efektif, masyarakat dapat membangun lingkungan yang lebih toleran dan harmonis yang menghargai dan memperkaya perbedaan.